



MANIFESTASI PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL MENCAPI BANGSA YANG SEJAHTERA

Oleh

Asep Hidayat¹, Cinta Amalia Putri²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [1drasephi62@gmail.com](mailto:drasephi62@gmail.com), [2Cintaamaliaa905@gmail.com](mailto:Cintaamaliaa905@gmail.com)

Abstract

The purpose of this writing is motivated by an incident or event that makes the author conduct a study. The author finds a number of facts regarding the quality of the country's infrastructure in economic, social and educational aspects in Indonesia. Therefore, on this occasion the author describes the ideal role to realize the country's development infrastructure in order to achieve a prosperous nation through several stages and strategies that must be realized by state officials or public officials. In this writing, the research method carried out is referring to a qualitative approach that refers to the study of literature. The results of the study explain that the best strategy in improving the quality of state development infrastructure is the best collaboration between the state apparatus and the community.

Keywords: Manifestation, Role, Development, Economy

PENDAHULUAN

Negara adalah wilayah teritorial yang terdiri atas sekumpulan orang yang bertujuan untuk menghidupkan dan mengembangkan sebuah filosofi bangsa yang dinamakan dengan kesejahteraan. Dalam mencapai kesejahteraan, negara pada umumnya memiliki aspek penting dalam menunjang kebutuhan lahiriah dan batiniah sejumlah masyarakat yakni aspek ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan adat istiadat budaya. Namun yang sangat perlu dijunjung tinggi adalah 3 aspek dari kelima tersebut di atas, pemerintah Indonesia memiliki sejumlah kebijakan guna menghidupkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan bangsa yang berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikatakan "bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha"

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa perekonomian nasional perlu ditingkatkan kualitasnya dapat membawa pada dampak perubahan positif bagi bangsa. Sejumlah fakta ditemukan bahwa negara kondisi perekonomian nasional saat ini dalam situasi kurang sinergis dan terkendali. Permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan (Fauzi, 2004). Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memerhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Karena, pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari.

Bagaimana peran sesungguhnya oleh aparat negara dalam menyelesaikan permasalahan ini. pemahaman lebih lanjut sebuah peran ideal dan berbagai strategi



dilakukan dalam mengatur pembangunan ekonomi negara sebagai upaya manifestasi bangsa yang optimal dan sejahtera.¹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial (Creswell, 2016). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016). Analisis data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan membandingkan berbagai sumber pustaka serta mengimpretasikan hasil analisis, dapat menjawab semua permasalahan. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah terjawab.

HASIL PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan perkapita memperhitungkan adanya pertumbuhan [penduduk](#) dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur

ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan [pendapatan nasional](#). Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan [GNP riil](#) di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti

dalam [lembaga](#), [pengetahuan](#), [sosial](#) dan [teknik](#). Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

- Pembangunan sebagai suatu proses
Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

¹ Utomo, Bangun Prajadi Cipto (2012) *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Akademik, Jakarta*.



- Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

- Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang

Perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam atau kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

Situasi Perekonomian Nasional Saat Ini

Dampak yang terlihat dari adanya Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian diberbagai Negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa Negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada pada triwulan I dan II di tahun 2020. Pandemi Covid-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi Negara. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Ekonomi

di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan Year on Year pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5.07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar -5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 %, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi Covid-19.

Selain itu Keputusan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Triwulan II merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi Covid-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2020. Kebijakan tersebut juga menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan, Covid-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan.



Peran Pemerintah Terkait Kebijakan Pemulihan Dalam Pembangunan Ekonomi Negara

Pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 (tiga) kebijakan yang akan dilakukan diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan bantuan – bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Pemerintah memberikan bantuan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Tercatat pula beberapa program yang telah direalisasikan oleh pemerintah sebagai berikut:

Pertama, Peningkatan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dalam program tersebut Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri antara lain melalui penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal, serta peninjauan daftar negatif investasi secara berkala. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan. *Pertama*, pemberian sistem insentif bagi kegiatan investasi masih kurang konsisten dan transparan. *Kedua*, masih rumitnya sistem perizinan usaha yang pada gilirannya akan menciptakan ekonomi biaya tinggi, khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah.

Kedua, Pemerintah telah memberikan program bantuan sosial PPKM guna menanggulangi angka kemiskinan dimasa pandemi, namun masih banyak kalangan mayoritas masyarakat yang belum terpenuhi akibat adanya kesalahan dalam pendistribusian program tersebut sehingga melahirkan tindakan diskriminasi.

Ketiga, Pemerintah telah mencetuskan kebijakan adanya program UMK yang diperuntukkan kepada masyarakat yang sedang bergerak di bidang usaha/ perdagangan, tetapi lagi-lagi masyarakat melakukan kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan dalam proses administrasi dan pemberian program tersebut sehingga terjadinya ketidaktepatan ataupun tidak tepat sasaran.²

Keempat, Pemerintah telah memberikan program KIP dan sejenisnya guna menanggulangi aspek pendidikan di Indonesia, sejumlah fakta ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya masih tercatat sejumlah anak-anak yang tidak sekolah dengan alasan tidak memiliki biaya.

² Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol.9, No.2 Tahun 2018



Mengenai program yang telah pemerintah realisasikan, sebenarnya masih banyak

Peringkat Ekonomi Negara Dalam Cakupan Internasional

Sebelum beranjak ke Indonesia, 10 peringkat terbesar angka perekonomian negara dalam cakupan internasional diantaranya sebagai berikut:

peringkat Perekonomian beberapa negara sebelum pandemi:

1. Amerika Serikat
2. China
3. Jepang
4. Jerman
5. India
6. Inggris
7. Prancis
8. Italia
9. Brasil
10. Kanada

peringkat Perekonomian beberapa negara setelah pandemi:

1. Amerika Serikat
2. China
3. Jepang
4. Jerman
5. Inggris
6. India
7. Prancis
8. Italia
9. Kanada
10. Korea Selatan

Merujuk pada data peringkat ekonomi Indonesia dalam cakupan internasional? Sebelum pandemi covid 19 menghadang Indonesia telah memperoleh hasil yang luar biasa dalam upaya pengurangan kemiskinan, tingkat kemiskinan menurun lebih dari setengahnya sejak 1999, menjadi 9,78% di tahun 2020. Sebelum krisis COVID-19, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, dimana baru-baru ini memenuhi syarat untuk mencapai [negara status pendapatan menengah ke atas](#).

Perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun, dimulai dari 2005 hingga 2025. Hal ini dibagi menjadi rencana jangka menengah 5 tahun, yang disebut RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) masing-masing dengan prioritas pembangunan yang berbeda. Rencana pembangunan jangka menengah saat ini - fase terakhir dari rencana jangka panjang - berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024. Rencana pembangunan ini bertujuan untuk lebih memperkuat perekonomian Indonesia dengan meningkatkan modal manusia dan daya saing di pasar global.

Masih banyak tantangan terkait pembangunan bagi Indonesia. Selain itu, krisis global akibat pandemi COVID-19 membawa komplikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunannya. Antara bulan Maret hingga September 2020, statistik resmi melaporkan kenaikan tingkat kemiskinan nasional dari 9,78% menjadi 10,19%, setara dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin dari 26,42 juta orang menjadi 27,55 juta, dari total penduduk sebesar 270,2 juta – yang berarti hilangnya tiga tahun capaian dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Selain itu, meskipun Indonesia mampu menurunkan angka stunting hingga 27,7% pada tahun 2019, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Upaya tersebut sangat penting untuk memastikan sumber daya manusia Indonesia kuat dan produktif. Menurut [Indeks Modal Manusia Bank Dunia](#), tingkat produktifitas generasi penerus Indonesia hanya akan mencapai 54% dari yang bisa diraih dengan adanya layanan kesehatan dan pendidikan yang lengkap.

Dalam merespon krisis COVID-19 secara segera, pemerintah telah mengimplementasikan paket fiskal darurat setara dengan 3,8% PDB tahun 2020 (belanja aktual) dan 4,2% PDB tahun 2021 (berdasarkan data hingga 18 Maret 2021), untuk menangani dampak kesehatan, bantuan



untuk rumah tangga dan usaha, mendukung upaya vaksinasi dan pemulihan. [Bank Dunia mendukung tanggap darurat COVID-19 di Indonesia](#), termasuk meningkatkan bantuan sosial dan sistem perawatan kesehatan sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan.³

Sistem Administrasi Pembangunan terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

Dalam sistem administrasi pembangunan, negara Indonesia memiliki beberapa tahapan perencanaan dalam pengorganisasian strategi pembangunan nasional diantaranya sebagai berikut.

Perencanaan sering disamakan dengan sistem politik suatu negara seperti kapitalis, sosialis dan campuran. Setiap bentuk campuran tangan pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai perencanaan. Oleh sebab itu perencanaan dapat dikatakan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan perencanaan ekonomi adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Dan perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal yaitu:

- 1) Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Selain itu Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta

adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu.

Ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan adalah:

- 1) Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
- 2) Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.

Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional

Alasan pentingnya dilakukan penataan regulasi di Indonesia adalah: 1) Terlalu banyaknya regulasi (Hyper-regulation) 2) Saling bertentangan (Conflictng) 3) Tumpang tindih (Overlapping) 4) Mult tafsir (Mult Interpretaton) 5) Tidak taat asas (Inconsistency) 6) Tidak Efektif; 7) Menciptakan beban yang tidak perlu (Unnecessary Burden) 8) Menciptakan Ekonomi Biaya Tinggi (High-Cost Economy) Untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, pemerintah pusat menegaskan agar reformasi hukum tidak hanya menyentuh sektor hilir yang terkait pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor hulu yang terkait dengan pembenahan regulasi, prosedur, dan penataan regulasi yang harus menjadi prioritas reformasi hukum saat ini. Regulasi harus sinkron satu sama lain dan sejalan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, serta kepentingan nasional. Regulasi yang tidak sinkron, tumpang tindih, dan membuat segala sesuatunya menjadi berbelit, itu harus dievaluasi. Regulasi harus sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang mengikat.

Pembentukan regulasi baru tidak boleh lagi dilihat sebagai proyek tahunan, tetapi

³ Weny Andika Damayanti
Departemen Kastrad FMIPA
Universitas Jember



benar-benar harus diperhatikan aturan itu memiliki landasan yang kuat secara konstitusional dan pembenahan regulasi ini dapat memanfaatkan teknologi yang ada dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini perlu dilakukan untuk membentuk sebuah pemerintahan yang baik (Good governance).

Adapun Penataan Regulasi yang kemudian harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia diantaranya:

- a. Evaluasi Seluruh Peraturan Perundang-Undangan
Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan perlu dilakukan mengingat kualitas regulasi saat ini masih rendah yang ditandai dengan masih adanya tumpang tindih dan disharmoni antar peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, jumlah regulasi juga masih dirasakan berlebihan serta tidak semuanya berdaya guna dan berhasil guna. Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan dilakukan melalui analisis dan evaluasi hukum untuk menilai norma hukum yang bersifat pengaturan (regeling), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan karena masih terdapat penyelundupan isu-isu primordial, sektarian, kepentingan asing, dan ego sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta masih belum harmonisnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Pembuatan Database Peraturan Perundang-undangan Yang Terintegrasi
Pada skala yang lebih luas, dengan tersedianya database yang baik maka

informasi publik terbuka semakin lebar sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan pemerintah, terutama dalam proses legislasi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan strategis untuk menguatkan fungsi pengawasan publik agar tidak terjadi penyimpangan.

Peran Ideal Dalam Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Ekonomi Negara

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di Negara Sedang Berkembang (NSB) termasuk di Indonesia adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut berarti perlu juga meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan dan investasi. Untuk negara Indonesia peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kemiskinan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini diakibatkan karena tingkat tabungan yang rendah, tingkat tabungan rendah karena tingkat pendapatan juga rendah. Akibatnya laju investasi juga rendah dan berpengaruh pada rendahnya modal dan produktivitas.

Untuk meminimalisir adanya laju investasi yang rendah, maka terdapat 2 peranan penting antara lain:

1. Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut “Industrialisasi yang diproteksi”.
2. Dengan cara menghimpun tabungan wajib yang disebut “Industrialisasi dengan kemampuan sendiri.

Adapun beberapa strategi ataupun peranan penting untuk manifestasi negara yang sejahtera melalui peningkatan kualitas pembangunan perekonomian nasional, diantaranya sebagai berikut:

- pertama*, Menyediakan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembangunan Ekonomi
- Kedua*, Percepatan Restrukturisasi Perusahaan Negara. Pelaksanaan arah



kebijakan restrukturisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan nilai kompetitif dari BUMN baik yang berbentuk Perum, Perjan, maupun PT yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi

Ketiga, Pengembangan Pasar Modal Peran dan fungsi lembaga pasar modal sebagai wahana untuk menyediakan alternatif sumber modal yang murah masih belum optimal. Akibatnya pasar modal kurang diminati oleh para pelaku ekonomi sebagai sumber pembiayaan. Karena itu dalam rangka meningkatkan sumber dana investasi berdasarkan ekuitas masyarakat maka pengembangan pasar modal, melalui penguatan institusi pasar modal, menjadi prioritas. Selain berbagai alternatif sumber pembiayaan, pengembangan pasar modal juga ditujukan untuk melindungi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Untuk itu, kebijakan ini diarahkan guna menumbuhkan transparansi pelaksanaan pasar modal, dan membangun mekanisme pengawasan secara profesional yang bersifat independen.

Keempat, Memberikan modal seperti program UMKM dengan catatan pemerintah harus terjun langsung dalam penataan dan pendistribusian tersebut

Kelima, Memberikan pelatihan kerja ataupun edukasi terkait keahlian yang dimiliki oleh setiap masyarakat individu karena mayoritas kalangan masyarakat tidak berpendidikan.

Keenam, Mencerdaskan kehidupan bangsa agar senantiasa negara Indonesia ini dapat maju dan berkembang di masa yang akan datang dengan memberikan beberapa program penunjang fasilitas pendidikan secara merata bagi masyarakat yang benar-benar kurang mampu.

Ketujuh, **Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial** Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya ekonomi dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan.

Kedelapan, **Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif** mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan di segala sisi dapat lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan.

Kesembilan, Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengonsumsi dan mencintai produk dalam negeri guna⁴ meningkatkan laba perusahaan yang ada di Indonesia.

Kesepuluh, Berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menunjang perekonomian nasional dengan cara pemerintah memberikan sejumlah beberapa program seperti bantuan sosial dan sejenisnya dengan tanda kutip adil dan tidak adanya diskriminasi pada saat proses pendistribusian, kemudian masyarakat dapat menggunakan dana dan bansos tersebut dengan sebaik-baiknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembangunan Ekonomi nasional merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

⁴ Edi Wibowo Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta



Pertumbuhan Perekonomian nasional hanya dapat ditingkatkan melalui beberapa strategi penting yang perlu diaplikasikan dalam program-program yang telah terencana. Poin penting yang dapat digarisbawahi dalam penulisan kali ini adalah bahwa pemerintah harus lebih tegas dalam setiap mengeluarkan kebijakan dan mendistribusikan setiap program nya dengan baik tanpa adanya tindakan diskriminasi ataupun suatu perbuatan yang sejenisnya.

Daftar Pustaka

- [1] Adeosun, Ahmed B., 2012. Nigeria@50: The Role Of Good Governance And Effective Public Administration Towards Achieving Economic Growth And Stability In Fledgeling Democracy. *International Journal of Politics and Good Governance*, Volume 3, No. 3.3, Quarter III, pp 1-17.
- [2] Agustina, Gita P., 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5, Nomor 4, 1-10.
- [3] [3] DAPP-BAPPENAS, "Pemetaan Hasil Identifikasi terhadap undang-undang Sektor yang Berpotensi Bermasalah", disampaikan pada workshop koordinasi strategis analisa peraturan perundang-undangan Jakarta, 5 Desember 2012.
- [4] Indeks Pembangunan Manusia, tersedia http://id.m.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia. Diakses pada tanggal 08 Mei 2017.
- [5] Lincoln Arsyad. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.
- [6] Mubyarto. 2005. *Visi Indonesia 2028. Satu Abad Sumpah Pemuda*. Aditya Media Yogyakarta (Bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Pancasila/PUSTEP UGM).
- [7] Naqvi, Syed Nawab Haider. (1985). *Etika dan Ilmu Ekonomi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- [8] Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- [9] Trisnawati Nina, Banga Wempy, Alam Syamsul, Analisis Efektivitas Pembangunan, *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol.9 No 2, 51-60, 2018.
- [10] Yogyakarta. Djojonegoro, Wardiman. 1995. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Pembangunan*. Depdikbud. Jakarta.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN